

Implementasi Kebijakan Tarif Angkutan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Di Trayek Manado-Langowan)

Implementation Of Public Transport Tariff Policies In North Sulawesi Province (Case Study On The Manado-Langowan Route)

Triksinia Lukow ^{(1)(*)}, Joyce J. Rares ⁽²⁾, Evelin J. R. Kawung ⁽²⁾

1) Peneliti Independen

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: triksilukow@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id	: Rabu, 31 Mei 2023
Disetujui diterbitkan	: Rabu, 31 Mei 2023

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of the Public Transportation Tariff policy in North Sulawesi Province, especially on the Manado - Langowan route transportation. This research was conducted from March to May 2023. The method used in this research is descriptive qualitative method. Informants used in this study were taken using purposive sampling technique totaling 16 people. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The research focused on aspects of policy content and policy environment. Data analysis is done by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the policy focused on the basis and purpose of implementation illustrated that the basis for implementing public transportation tariff policies in North Sulawesi Province without exception on the Manado-Langowan route was based on Governor's regulation Number 303 of 2022 where through the Governor's regulation it was issued intended to adjust city transportation rates in the province of economy class including for public vehicles and taxis. Implementation of public transport tariff policies in North Sulawesi Province for the Manado-Langowan route, the government plays a full role in setting tariffs where its implementation is supported by drivers and passengers as policy users.

Keywords : implementation; tariff; public transportation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Tarif Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Utara khususnya pada angkutan trayek Manado – Langowan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 16 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian di fokuskan pada aspek isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang di fokuskan pada dasar dan tujuan implementasi menggambarkan bahwa dasar pelaksanaan kebijakan tarif angkutan umum di Provinsi Sulawesi Utara tanpa terkecuali pada trayek Manado-Langowan didasarkan pada peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2022 dimana melalui peraturan Gubernur tersebut dikeluarkan dimaksudkan untuk penyesuaian tarif angkutan kota dalam provinsi kelas ekonomi termasuk untuk kendaraan umum dan juga taksi. Implementasi kebijakan tarif angkutan umum di Provinsi Sulawesi Utara untuk trayek Manado-Langowan pemerintah berperan penuh dalam penetapan tarif dimana dalam pelaksanaannya didukung oleh pengemudi dan penumpang sebagai pengguna kebijakan.

Kata kunci : implementasi; tarif; angkutan umum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transportasi di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat, hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun sehingga semakin tingginya aktivitas masyarakat melakukan perjalanan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain maka kegiatan berlalu lintas juga semakin padat, maka harus ada sarana yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Transportasi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Transportasi telah menjadi media untuk melakukan perpindahan barang ataupun orang dari suatu tempat menuju tempat tujuan. Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi semakin lama semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pergerakan yang dilakukan penduduk tersebut dalam kegiatan sehari-harinya. Manusia dalam kehidupan masa sekarang ini tidak dapat lepas dari kebutuhannya dengan transportasi modern. Mulai dari berangkat sekolah, kerja, belanja, bepergian untuk liburan, pengiriman barang, penyaluran bahan mentah dan barang produksi, dan berbagai kegiatan lainnya. Sehingga transportasi menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang perekonomian.

Tidak semua masyarakat mampu membeli sarana transportasi pribadi (kendaraan pribadi) untuk mendukung mobilitasnya, karena itu diperlukan pihak atau instansi yang mampu menyediakan jasa angkutan transportasi umum untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat yang memerlukannya. Keadaan ini memiliki hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu antara penyedia jasa transportasi dan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi (yang disebut dengan penumpang). Penumpang dapat memperoleh manfaat layanan dari penyedia jasa transportasi, yaitu dapat melakukan perpindahan orang/barang untuk jarak yang jauh tanpa harus memiliki kendaraan sendiri. Sedangkan penyedia jasa memperoleh balas jasa berupa ongkos yang dibayarkan oleh penumpang atas layanan yang diterimanya, yang merupakan pendapatan bagi penyedia jasa transportasi.

Salah satu aspek transportasi yang diharapkan mampu mengangkut atau

memindahkan orang banyak adalah angkutan umum. Angkutan umum merupakan moda transportasi yang berperan memberikan pelayanan kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas, terutama masyarakat yang tidak memiliki alternatif pilihan moda transportasi. Angkutan umum berperan melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas menggunakan jasa transportasi. Minat masyarakat menggunakan angkutan umum bisa menjadi sangat rendah apabila tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai oleh pihak penyedia jasa transportasi dan faktor terbesar dalam menarik orang untuk melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum adalah tarif terjangkau yang ditetapkan pemerintah maupun penyedia jasa transportasi.

Keinginan penumpang mendapatkan tarif yang murah dan terjangkau dapat berlawanan dengan tarif yang diinginkan oleh operator. Dengan demikian penetapan tarif sebaiknya harus bisa menjembatani kepentingan konsumen selaku pengguna jasa dan juga operator selaku penyedia jasa angkutan umum. Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan tarif, seperti kondisi ekonomi masyarakat, biaya pemeliharaan/suku cadang, harga bahan bakar, sarana dan prasarana, dan sebagainya.

Permasalahan yang sering terjadi pada pengguna jasa angkutan umum adalah merasa dirugikan dalam hal penetapan harga tarif yang sering dilakukan oleh pengemudi angkutan umum. Bila ditinjau dari sisi pengemudi angkutan umum terdapat masalah pada pemasukan pengemudi angkutan umum, pendapatan pengemudi angkutan umum tergantung pada jumlah penumpang dan besaran tarif angkutan umum. Tarif angkutan umum yang ditetapkan pemerintah, seringkali kurang memperhatikan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dikeluarkan oleh pengemudi angkutan umum.

Angkutan umum memiliki suatu peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. Angkutan merupakan elemen yang sangat penting dalam perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota dan desa, berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum yang

seharusnya berorientasi kepada kenyamanan pengguna, sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.

Observasi yang secara khusus dilakukan pada trayek Manado-Langowan mengalami pasang surut sejak tidak stabilnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketidakstabilan tersebut menjadi bagian dari efek perekonomian dunia yang masih pada status pandemi *covid-19* yang secara keseluruhan kebutuhan kehidupan sehari-hari ikut berkembang atau meningkat. Oleh sebab itu dengan adanya situasi yang terjadi, hal ini menjadi stimulan bagi para sopir angkutan untuk menaikkan tarif angkutan umum bagi para pengguna jasa angkutan umum termasuk angkutan dengan trayek wilayah Manado-Langowan. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara mengkonfirmasi bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 303 Tahun 2022 tarif trayek angkutan mengalami perubahan disebabkan oleh adanya peningkatan daya beli pengguna jasa angkutan serta disebabkan oleh pengalihan subsidi BBM. Peningkatan juga diakibatkan oleh jarak yang ditempuh serta besaran bebandan densitas yang ada yang memicu peningkatan biaya transportasi namun hal yang paling besar biaya-biaya kenaikan terhadap transportasi dipicu oleh jarak tempuh kendaraan dalam hal ini angkutan umum.

Hal ini juga berlaku bagi angkutan umum trayek Manado Langowan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (BPS) tahun 2022, jarak Manado-Langowan melalui jalan raya Manado-Tomohon mencapai 54.7km dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 49 menit. Disesuaikan dengan peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2022 menjelaskan bahwa biaya tarif angkutan dengan rute Manado-Langowan ditetapkan sebesar Rp23.800 untuk umum sedangkan untuk tarif bagi pelajar dikenakan sebesar Rp21.700. Kenyataan di lapangan berbanding terbalik atau tidak sesuai dengan peraturan Gubernur. Terdapat beberapa alasan yang disampaikan sopir angkutan umum. Biaya transportasi lebih besar dari yang ditentukan pemerintah di mana sopir angkutan kebanyakan membulatkan biaya transportasi menjadi lebih besar daripada seharusnya. Pengemudi angkutan umum trayek Manado-Langowan sering memberikan alasan, bahwa tidak memiliki uang kembali, terlalu lama menunggu penumpang sehingga ada baiknya penumpang membayar lebih

agar angkutan tidak penuh sesuai dengan jumlah angkutan. Namun kekosongan yang terjadi dibebankan kepada penumpang yang sudah berada di dalam angkutan umum.

Selain itu, kenaikan upah sepihak oleh para pengemudi disebabkan oleh penetapan tarif taksi gelap dan taksi online. Kemudian membuat pihak angkutan umum dalam hal ini supir angkutan umum melakukan pungutan diluar tarif sehingga membuat besar tarif tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam hal ini Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 303 Tahun 2022. Dikarenakan banyak dari para pengguna transportasi terdiri dari masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata, sehingga harus ada tindakan dari pemerintah dalam pelaksanaan aturan yang telah dibuat untuk memberikan keringanan kepada masyarakat yang adalah pengguna jasa transportasi.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian “Implementasi Kebijakan Tarif Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus di Trayek Manado-Langowan).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Tarif Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus di Trayek Manado – Langowan).

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian secara detail dapat dijabarkan:

1. Secara akademis, untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang trayek Manado-Langowan.
2. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak – pihak yang bergelut dalam pengambilan kebijakan terutama dalam bidang angkutan umum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Diharapkan melalui kajian ini, para implementor dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya dalam melayani masyarakat terutama dalam bidang tarif angkutan umum. Serta diharapkan dapat memberi sumbangan serta menjadi bahan masukan bagi instansi terkait.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2023, dimulai dari proses penyusunan proposal, proses pembimbingan dan penyajian dalam bentuk tesis. Penelitian dilaksanakan di Manado-Langowan.

Rencana Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran suatu fenomena atau kenyataan sosial secara jelas yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus di Trayek Manado-Langowan).

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, dan kepercayaan; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Basuki, 2006).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2022 tentang Tarif angkutan umum di provinsi Sulawesi Utara (studi kasus di trayek Manado-Langowan) yang diamati berdasarkan pada isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) yang terdiri dari:

1. Indikator isi kebijakan; dasar dan tujuan yang ingin dicapai tentang tarif angkutan umum dilihat dari Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2022 di provinsi Sulawesi Utara.
2. Indikator lingkungan kebijakan; kerjasama dan optimalisasi pelayanan serta partisipasi masyarakat.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara, pengaruh sistem penyimpanan arsip Koran suara merdeka terhadap kemudahan proses temu kembali

informasinya. Dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu informan yang memahami informasi tentang objek penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel (Sugiyono, 2011). Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena dalam hal ini kebijakan tarif angkutan umum di Provinsi Sulawesi Utara. Peneliti menentukan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, terdiri dari:

1. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara (3 orang).
2. Petugas Perhubungan di Terminal Manado-Langowan dan Terminal Langowan Manado (3 orang).
3. Pengemudi Angkutan umum Manado-Langowan (3 orang).
4. Masyarakat pengguna angkutan umum Manado-Langowan (7 orang).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi merupakan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur dan observasi nonpartisipan. Observasi terstruktur adalah observasi yang dipersiapkan tentang apa yang akan diobservasi berupa rambu-rambu pengamatan meskipun sederhana dan berkembang dilapangan. Sementara observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan, tetapi hanya sebagai pengamat (Arikunto, 2011).
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2011). Beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang semiterstruktur yang pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Wawancara ini masuk dalam kategori *in-dept interview* (wawancara mendalam) yang pelaksanaannya lebih bebas serta terbuka dengan meminta pendapat dan ide-ide dari informan. Serta dilakukannya wawancara ini agar penulis mendapat data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dokumentasi merupakan metode mengkaji dan mengolah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia sebelumnya yang mendukung data penelitian. Menurut Burhan (2008) metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri histories. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian yang berasal dari, artikel, jurnal, majalah, berita internet, yang memberikan informasi kebijakan tarif angkutan umum di Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini terdiri tahap reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi menurut Miles dan Huberman (1992), yaitu:

1. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tetapi paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.
3. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

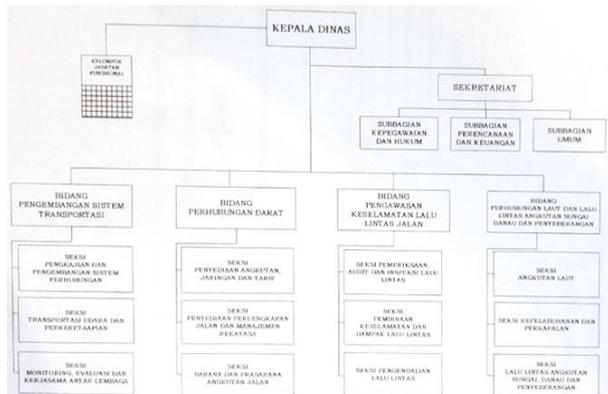
Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Langowan memiliki jarak tempuh dari ibukota provinsi yaitu Kota Manado yang melewati kota Tomohon yang berjarak 54.7 km yang ditempuh dalam waktu 1 jam 49 menit.

Penetapan tarif angkutan khususnya trayek Manado-Langowan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk penyesuaian harga bahan bakar minyak dan pengalihan subsidi BBM dimana untuk meningkatkan daya beli pengguna jasa angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan tetap memperhatikan upaya peningkatan mutu pelayanan maka pemerintah menetapkan tarif angkutan umum termasuk untuk trayek Manado-Langowan. Dalam pelaksanaan peraturan Gubernur Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara merupakan implementator pelaksanaan peraturan Gubernur yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh bapak Izak R.P. Rey, SE., M.Si dengan visi Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia. Dengan misi yang diemban yaitu 1) peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara, 2) penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian perikanan pariwisata dan perluasan konektivitas, 3) pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas, 4) Pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan 5) pemerintahan yang baik dan bersih didukung sinergitas antar daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Utara sudah terdapat tupoksi yang dapat dilihat dari struktur organisasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara

Deskripsi Daerah Penelitian

Informan Penelitian

Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 16 responden yang terdiri

dari penumpang angkutan umum, pengemudi dengan trayek Manado-Langowan serta, pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara dan petugas Dinas Perhubungan yang berada di terminal penumpang angkutan umum.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Inisial Informan	Status Informan
1.	J. S	Kepala Bagian Jaringan dan Tarif Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Utara
2.	A. V	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi
3.	A. C	Staf Bagian Jaringan dan Tarif Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Utara
4.	E. L	Kepala Terminal Tipe B Karombasan
5.	O. P	Petugas Pengelola Transportasi Terminal
6.	R. K	Petugas Pengelola Transportasi Terminal
7.	L. K	Pengemudi/Sopir Angkutan Umum Trayek Manado Langowan
8.	C. W	Pengemudi/Sopir Angkutan Umum Trayek Manado Langowan
9.	J. T	Pengemudi/Sopir Angkutan Umum Trayek Manado Langowan
10.	O. K	Penumpang Trayek Manado Langowan
11.	Z. M	Penumpang Trayek Manado Langowan
12.	I. W	Penumpang Trayek Manado Langowan
13.	A. M	Penumpang Trayek Manado Langowan
14.	B. M	Penumpang Trayek Manado Langowan
15.	T. W	Penumpang Trayek Manado Langowan
16.	H. P	Penumpang Trayek Manado Langowan

Sumber: Data Olahan, 2023

Para informan yang ditentukan merupakan informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian terlebih khusus yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan tarif angkutan umum khususnya trayek yang berada di Manado-Langowan yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenis purposive sampling atau informan dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti.

Hasil Wawancara

Biaya tarif angkutan umum atau biaya operasional kendaraan memiliki undang-undang yang mengatur. Dimana perhitungan biaya pokok, dasar struktur biaya diatur oleh masing-masing provinsi atau daerah oleh kepala daerah setempat. Angkutan umum khusus untuk penumpang merupakan kendaraan yang memiliki sifat umum

dalam pengoperasiannya yang bertujuan membawa penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan yang dilakukan dengan cara penumpang membayar sesuai dengan ketentuan jumlah yang telah ditentukan yang diatur oleh pemerintah daerah setempat. Angkutan umum digunakan oleh pengguna transportasi yang dikenakan biaya sesuai dengan jarak yang ditempuh dimana pelayanan tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik pemahaman, nyaman dan bisa memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menjalankan aktivitas. Selain itu dapat juga mempengaruhi harga satuan jasa cara menentukan biaya yang dilakukan secara efektif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2002 menjelaskan bahwa terdapat perubahan atau penyesuaian tarif angkutan umum sebagai angkutan penumpang antar kota dengan kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan taksi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan khusus untuk penentuan tarif angkutan umum.

Dalam hal pertimbangan penentuan tarif angkutan umum, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan informan J.S yang adalah Kepala Bagian Jaringan Dan Tarif Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan penyesuaian tarif angkutan umum untuk seluruh trayek angkuta yang berada di provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan termasuk trayek Manado Langowan menyatakan, dalam menentukan tarif angkutan umum tentunya terdapat pertimbangan yang harus dilakukan yaitu faktor yang dapat mempengaruhi penentuan tarif transportasi berupa jarak, berat, densitasi. Dengan faktor penentuan tarif berdasarkan jarak tempuh merupakan faktor utama, karenanya pemerintah menentukan tarif itu sesuai jarak yang paling berpengaruh itu disebabkan oleh jarak karena semakin jauh jarak tempuh dari kendaraan yang memuat penumpang tentu biaya angkutan transportasi dalam hal ini penumpang tentunya tidak sama dengan biaya angkutan transportasi yang memiliki jarak lebih dekat.

Penelitian menggunakan pendekatan dan analisis implementasi kebijakan tarif angkutan umum yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang difokuskan pada trayek Manado-Langowan yang didasarkan pada teori yang berkaitan dengan indikator tentang kebijakan dan lingkungan implementasi.

1. Dasar dan Tujuan Implementasi Kebijakan Tarif Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Utara pada trayek Manado-Langowan yaitu pada Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2022. Secara keseluruhan peraturan tersebut berkaitan tentang penyesuaian kembali tarif angkutan penumpang antarkota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan taksi Provinsi Sulawesi Utara. Sebab, tarif merupakan suatu nilai jasa pelayanan yang ditentukan dengan ukuran sejumlah uang yang didasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang yang telah ditetapkan maka pengguna jasa harus membayarkan biaya jasa yang dilakukan pemberi jasa. Dalam hal angkutan umum tentunya pengguna jasa yaitu masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum di mana harus melakukan pembayaran sebagai bagian terhadap jasa yang telah diberikan, dalam hal ini pengemudi atau sopir. Pelaksanaan dalam implementasi kebijakan khususnya penetapan tarif angkutan umum baik yang AKDP maupun taksi, dilakukan dengan harapan bahwa dengan tarif yang telah ditentukan dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang oleh pemerintah dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga dapat menyesuaikan kebutuhan atau yang seharusnya diperoleh para Pemberi jasa dalam hal ini para pengemudi atau sopir angkutan umum yang disesuaikan dengan jarak yang ditempuh dari lokasi tujuan sampai pada lokasi yang dituju. Dalam pelaksanaan kebijakan tarif angkutan umum tentu saja dapat memberikan manfaat baik bagi penumpang sendiri maupun Pemberi Jasa dalam hal ini sopir atau pengemudi bus angkutan umum.

2. Dalam rangka untuk mewujudkan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sejak tahun 2020 pemerintah meluncurkan layanan angkutan perkotaan dengan skema pelayanan yang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, mekanisme pelayanan angkutan umum oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus memenuhi aspek kenyamanan keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan serta memenuhi aspek-aspek yang telah ditentukan termasuk tentang pemberian tarif angkutan umum. Penentuan tarif angkutan umum tentunya merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk

mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang pada pelaksanaannya memiliki kerjasama antara seluruh stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan tentang tarif angkutan umum serta harus adanya partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran dari penentuan tarif angkutan umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pelaksanaan kebijakan tarif angkutan umum Provinsi Sulawesi Utara tanpa terkecuali pada trayek Manado-Langowan didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 303 Tahun 2022 dimana peraturan tersebut dimaksudkan untuk penyesuaian tarif angkutan kota dalam provinsi kelas ekonomi termasuk untuk kendaraan umum dan juga taksi. Dengan tujuan pelaksanaan kebijakan tarif angkutan yaitu untuk dapat meningkatkan akses pelayanan yang diharapkan dengan tarif yang rendah dengan tujuan agar seluruh masyarakat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dapat mengakses pelayanan penggunaan angkutan umum dan dapat meningkatkan serta menjamin mutu pelayanan angkutan menjadi lebih baik. Kemudian dalam hal kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak pengemudi maupun dengan penumpang, secara tidak langsung tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dibuktikan dengan adanya kenaikan tarif angkutan lebih lambat dari adanya tarif angkutan naik, dalam hal ini kenaikan bahan bakar minyak. Selain itu, koordinasi yang dilakukan dari pemerintah daerah kepada para pelaku implementasi di bawah yaitu para petugas-petugas perhubungan yang ada di terminal dalam menyampaikan tarif angkutan ini terlambat informasinya sampai kepada penumpang maupun kepada pengemudi.

Dasar, Tujuan dan Manfaat Implementasi Kebijakan Tarif Angkutan Umum Provinsi Sulawesi Utara Trayek Manado– Langowan

Transportasi memainkan kunci utama dalam pergerakan logistik sehingga strategi penetapan tarif menjadi isu penting dalam transportasi baik di darat maupun laut dan udara. Angkutan umum merupakan transportasi darat yang paling banyak berada di kota-kota besar dimana angkutan umum ini sangatlah penting keberadaannya dalam menjalankan fungsi utama sebagai pengangkut pergerakan masyarakat mengerjakan aktivitas sehari-hari dimana pelayanan yang diberikan

diharapkan dapat dilakukan secara cepat, aman, nyaman, murah dan efisien. Hal tersebut dapat menyebabkan kemudahan dan kelancaran pergerakan sehingga fungsi dari keberadaan seseorang dan nilai kegunaan suatu barang dapat dimaksimalkan dengan baik yang dapat dipandang dari segi tempat maupun segi waktu sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan suatu daerah dalam hal ini satu kota termasuk angkutan umum yang berada di Provinsi Sulawesi Utara khususnya untuk trayek Manado-Langowan.

Angkutan umum yang ada di Kota Manado khususnya trayek Manado-Langowan berupa kendaraan kategori besar yaitu bus Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP). Bus kota memiliki peran yang sangat penting dan mencakup mendominasi dibandingkan angkutan umum yang lain yang dalam proses pemenuhan kebutuhan transportasi bagi masyarakat berguna untuk melaksanakan aktivitas. Dalam proses pengoperasian angkutan bus dikelola oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Banyak perusahaan swasta yang mengelola angkutan bus kota sehingga diperlukan satu kebijakan dari pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar sistem dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai pelayanan yang maksimal di mana salah satu kebijakan yang sangat penting itu tentang penentuan tarif angkutan. Bantuan tarif angkutan tentunya membutuhkan Penanganan dan kebijakan yang Arif dikarenakan dapat menjembatani kepentingan penumpang sebagai konsumen dan juga pengusaha sebagai operator angkutan umum. Hal ini Tentunya dengan lemahnya daya beli masyarakat sering menjadi alasan penundaan bahkan pembatalan perubahan tarif yang ada dan juga diakibatkan oleh harga bahan bakar minyak yang terjadi kenaikan baik secara internal negara maupun secara global. Tarif angkutan yang ditentukan pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan umum khususnya perkotaan dengan mutu standar keselamatan yang mempertimbangkan kemampuan dan kemauan dari para penumpang, dalam hal ini sebagai pihak yang membeli dan yang memakai jasa angkutan.

Angkutan bus yang berada atau melayani proyek Manado-Langowan merupakan salah satu angkutan yang melayani daerah yang begitu strategis dengan jalur trayek yang panjang yang

dilihat dari rutennya melewati kawasan-kawasan perkotaan diantaranya Kota Manado sendiri Kota Tomohon bahkan sampai pada daerah Kabupaten Minahasa. Selain itu, angkutan bus kota yang melayani trayek Manado-Langowan memiliki tingkat kenyamanan dan kebersihan yang baik dibandingkan dengan kendaraan lainnya yang diharapkan penumpang ini dapat mewakili penumpang angkutan umum khususnya bus kota yang ada di Manado dalam memberikan persepsi terhadap tarif angkutan umum khususnya angkutanbus. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif seperti kondisi ekonomi masyarakat, biaya pemeliharaan suku cadang, harga bahan bakar, sarana dan prasarana. Perubahan harga bahan bakar diharapkan dapat ikut memberikan perubahan terhadap tarif angkutan umum yang ditentukan oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan namun ada hal kontras yang harus diperhatikan bahwa perubahan harga minyak dunia bersamaan dengan krisis global yang dialami oleh hantu seluruh negara di dunia sehingga berdampak pada kenaikan harga komponen dan dapat berpengaruh pada biaya operasional kendaraan.

Penentuan tarif angkutan didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang tarif dasar, tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antar kota antar provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dijelaskan bahwa tarif transportasi angkutan umum ditentukan oleh faktor jarak, dimana faktor jarak merupakan faktor paling utama dalam penentuan tarif kekuatan transportasi serta berat, dan densitas dimana penetapan tarif transportasi ditetapkan berdasarkan dua tahapan. Tarif angkutan merupakan salah satu pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan pembelian jasa transportasi selain pertimbangan kinerja operasi transportasi dan kualitas pelayanan. Pengenaan tarif angkutan penumpang per dalam mendukung konektivitas angkutan bertujuan menganalisis kesesuaian tarif angkutan dan perumusan langkah-langkah untuk dapat meningkatkan efektivitas tarif angkutan penumpang dalam hal ini penumpang antar kota dalam provinsi khususnya trayek Manado-Langowan. Tarif ideal merupakan tarif yang sesedikit mungkin, namun memperoleh hasil yang lebih tinggi dari tarif operasi sehingga dapat memperoleh penghasilan anggaran yang layak

bagi pengusaha maupun bagi pengemudi untuk memperhitungkan jasa pengangkutan ditetapkan memiliki beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan.

Keinginan pengguna jasa transportasi atau penumpang untuk memperoleh tarif yang murah dan terjangkau tentunya tidak sama dengan tarif yang sudah diberlakukan atau yang ditentukan oleh operator dalam hal ini pengemudi di mana untuk menentukan tarif awal atau penyesuaian tarif yang diperlukan dibutuhkan suatu kajian yang terstruktur dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan jalan tengah antara keinginan pengguna jasa dan keinginan para pengemudi angkutan umum. Dengan adanya kebijakan tarif tentunya dapat memiliki banyak fungsi seperti perangkat pengatur lalu lintas, perangkat untuk menunjang penduduk, untuk menggunakan kendaraan lainnya serta di sisi lain untuk memajukan perekonomian antar wilayah. Penentuan kebijakan tarif dari berbagai jenis jasa pengangkutan diberikan pada mekanisme market yaitu perjanjian atau proses tawar-menawar antara pengguna jasa dengan penyedia jasa di mana dalam suatu fase tertentu tarif yang sudah diterapkan pemerintah yaitu tambahan harga wajib dibayar oleh pihak pengguna jasa angkutan biasanya berlaku pada saat hari-hari tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan penentuan tarif angkutan ini paling besar dipengaruhi oleh biaya operasi di mana biaya yang sudah diwujudkan ke dalam bentuk rupiah per ton maupun KM untuk pengangkutan barang dan jika angkutan umum diwujudkan dengan rupiah per penumpang. Selain itu terdapat juga biaya Marginal dimana biaya marginal merupakan biaya yang dapat menguntungkan perusahaan angkutan umum serta ditentukan dengan adanya prinsip biaya yang dikeluarkan dimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional kendaraan itu harus memiliki tujuan yaitu memanfaatkan sarana publik secara maksimal serta menciptakan persaingan yang sehat baik bagi para pelaku jasa transportasi dan mematikan barang-barang terutama kebutuhan yang ada di sekitar masyarakat harus seimbang kenaikannya dengan tarif yang ada dalam hal ini bahan bakar minyak.

Hal yang ditentukan oleh tarif pengangkutan umum yang dikhususkan untuk para konsumen pada umumnya tidak sulit mau ataupun lebih mudah dibandingkan dengan

menentukan tarif untuk pengangkutan umum khusus barang hal tersebut dikarenakan menentukan harga pengangkutan barang tersebut melingkupi ratusan bahkan ribuan harga dari berbagai macam-macam barang yang dikemas menggunakan berbagai cara dan wajib dibawa menggunakan berbagai ukuran serta memiliki arah pengiriman yang tidak sama satu sama lainnya. Dalam penentuan tarif angkutan harga menentukan besarnya penerimaan perusahaan jasa angkutan dimana perusahaan jasa angkutan berusaha menetapkan tarif setinggi mungkin sedangkan pemakai jasa menghendaki tarif serendah mungkin. Kewajaran tarik bagi perusahaan angkutan yaitu apabila dapat menjamin penghasilan di atas biaya operasi angkutan, oleh sebab itu kewajaran bagi pemakai jasa, tarif dikatakan wajar kalau tarif itu berada dalam jangkauan daya beli pemakai di mana penetapan tarif didasarkan pada hasil perhitungan biaya satuan dan perusahaan jasa angkutan yang selanjutnya ditetapkan oleh pemerintah selain disebabkan atau bergantung pada jarak yang ditempuh suatu trayek termasuk trayek Manado Langowan.

Setiap jasa angkutan memiliki cara-cara berbeda yakni barang yang diangkut dan gerakan yang dibuat serta bermacam ragam tarif yang harus ditawarkan atas barang yang beraneka ragam dan menurut tempat asal dan tempat tujuan yang banyak. Pada prinsipnya dalam melandaskan penentuan tarif dirumuskan dengan tiga sasaran yaitu setiap tarif harus menutupi biaya penciptaan jasa angkutan, setiap tarif harus menggerakkan jumlah lalu lintas dan setiap tarif harus menanggung beban yang adil dari biaya dalam perbandingannya dengan tarif lain.

Pada surat keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2022 menyatakan untuk menentukan harga tarif angkutan dibedakan antara harga umum atau biaya produksi sebagai biaya yang dikeluarkan oleh jasa angkutan umum untuk menghasilkan suatu produksi di mana tarif pokok X darat Ditambahkan 10% sebagai jumlah keuntungan. Selain itu satuan produksi harus juga ditentukan dimana persatuan produksi merupakan pembagian antara jumlah produksi dengan jumlah armada yang digunakan dalam angkutan umum yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai suatu alat produksi yaitu alat yang digunakan untuk proses produksi dalam hal ini

angkutan umum serta jarak perjalanan moda transportasi dari mulai awal naik sampai ke tujuan dalam satu waktu.

Penetapan harga suatu tarif angkutan umum dianggap sebagai suatu strategi di mana tarif angkutan sebagai harga merupakan salah satu pertimbangan bagi konsumen dalam memutuskan pembelian jasa transportasi selain pertimbangan kinerja operasi transportasi serta kualitas pelayanan. Umumnya penetapan harga transportasi didasarkan pada biaya di mana biaya menjadi faktor yang sangat penting untuk membentuk harga atau tarif transportasi yang dibebankan kepada konsumen di mana pemahaman mengenai pemicu biaya dalam transportasi sangat penting. Tarif transportasi ditentukan oleh berbagai faktor dimana faktor jarak merupakan faktor utama yang menentukan biaya transportasi di mana jarak transportasi berkontribusi secara langsung terhadap biaya seperti tenaga pengemudi biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan kendaraan. Semakin jauh jarak transportasi maka biaya transportasi semakin besar tersebut dikarenakan dalam biaya transportasi ada biaya tetap atas kegiatan pick up dan delivery barang termasuk pada penumpang tanpa memandang Berapa jarak yang ditempuh sehingga biaya ini dianggap sebagai biaya sewa kendaraan apabila kendaraan disewakan atau biaya depresiasi kendaraan apabila kendaraan diperoleh dengan investasi sendiri dan biaya gaji supervisor. Faktor kedua dalam pemicu biaya transportasi adalah berat semakin berat barang yang diangkut maupun jumlah penumpang yang diangkut maka semakin besar biaya transportasi yang dibutuhkan namun pada titik berat tertentu skala ekonomis dapat terjadi dikarenakan struktur dia transportasi sendiri dari biaya tetap dan biaya variabel.

Tarif transportasi berubah sesuai dengan aktivitas atau pemicu biaya transportasi dimana biaya transportasi umumnya dihitung dalam ukuran biaya per km per unit berat ataupun jumlah penumpang yang berada di dalam kendaraan. Cari transportasi ditetapkan berdasarkan dua pun tahapan yaitu pengelompokan kategori jenis produk dan barang yang diangkut serta penetapan tarif berdasarkan jenis kelompok produk atau barang atau berserta densitas dan jarak. Spesifikasi produk atau barang yang diangkut berdasarkan karakteristik produk atau barang yang mempengaruhi biaya handling

atau biaya transport di mana produk atau barang atau penumpang dengan kesamaan dalam densitas dan nilai produk dikelompokkan dalam satu kelas kelompok barang tertentu yang bertujuan di mana agar dapat diperoleh basis pentarifan yang sederhana sehingga perusahaan operator transportasi tidak perlu menetapkan tarif berjenis produk atau barang yang diangkut dan harus didasarkan pada peraturan tarif angkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Angkutan umum menjadi suatu persoalan yang cukup serius baik masa sekarang maupun masa yang mendatang, dimana sejumlah tantangan tentunya harus diantisipasi agar kebijakan yang diambil dapat secara tepat dan efektif dalam menjawab permasalahan. Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah sebagai suatu kelembagaan menjadi salah satu isu sentral yakni tentang bagaimana pemerintah merespon tanggung jawab permasalahan tentang angkutan umum, di mana partisipasi dari kelompok kepentingan baik pemerintah masyarakat, lembaga penelitian, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum professional dan praktisi yang secara keseluruhan sangat perlu meningkatkan proses penentu kebijakan tarif angkutan umum sehingga peran pemerintah daerah cukup besar dalam kaitannya dengan konteks otonomi daerah sebagai bentuk bagian aspirasi daerah yang harus diperhatikan serta pemberdayaan angkutan umum lewat kelembagaan yang baik sebagai suatu tuntutan perbaikan pelayanan angkutan bagi masyarakat pemerintah dalam penentuan tarif angkutan umum harus memperhatikan selain jarak tempuh masing-masing trayek yang ada tetapi harus juga mempertimbangkan situasi dan keadaan ekonomi masyarakat terutama pada masa-masa yang mengalami kebutuhan ekonomi meningkat namun pendapatan ekonomi berkurang terutama bagi kebanyakan masyarakat dengan ekonomi kurang.
2. Kerjasama serta koordinasi dan partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat

penting dalam hal yang berkaitan dengan tarif panggul dan umum dikarenakan menjadi bagian pelayanan publik oleh sebab itu koordinasi secara terus-menerus dan kerjasama seluruh stakeholder ataupun lembaga dan instansi yang terkait tentang kebijakan mengenai tarif angkutan umum harus terus dilakukan dan juga dibutuhkan peran serta masyarakat sehingga masyarakat harus juga berkontribusi dalam hal penentuan tarif angkutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti memberikan masukan:

1. Kebijakan dan tantangan pelayanan angkutan umum senantiasa menjadi tanggung jawab bersama namun pemerintah dalam hal ini merupakan bagian yang paling penting ataupun paling dominan dalam penentuan tarif angkutan. Sebab itu pemerintah harus mengkalkulasikan secara baik dan tepat yang dianggap sebagai pola tanggung jawab kepada masyarakat dan juga pada pengemudi sebagai pengusaha angkutan umum sehingga harus mampu memelihara dan menggunakan transportasi anggota umum dalam segala aktivitas dan juga diharapkan perhatian pemerintah dalam pengoperasian angkutan umum harus lebih digerakkan karena dituntut untuk lebih meningkatkan segala bentuk pelayanan yang terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.
2. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan dinas terkait dalam hal ini dinas perhubungan tentang tarif angkutan umum harus terus dikembangkan serta dilakukan koordinasi tentang situasi tarif angkutan umum yang terjadi di lapangan dan juga peran serta masyarakat perlu untuk ditingkatkan dengan tujuan agar ekonomi yang ada di masyarakat menjadi berkembang dan tentunya dapat membantu pelayanan publik menjadi lebih baik hari demi hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2011. *Prosedur suatu Pendekatan Praktek (VI)*. Rineka Cipta.
- Basuki, S. 2006. *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra. Jakarta.

Burhan, B.H.M. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta.

Miles, M.B. & A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. UI Press. Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.